

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat digambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pendidikan sederajatnya.

Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah dan tempat kegiatan belajar mandiri baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (Kemendikbud, 2013:1).

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004:194).

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian

Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono,2015:170).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekedar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut

menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu sekolah yang menjadi sasaran dalam pemberian dana BOS. Salah satunya adalah SDN 01 Batealit, yang mana sekolah ini telah menerima penyaluran dana BOS sejak tahun 2009 yang masih berlanjut sampai saat ini, dengan demikian sudah tentu SDN 01 Batealit dituntut untuk melakukan pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien. Dalam hal ini penggunaan dana BOS harus dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Pengelolaan terhadap dana BOS diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan dan akses pelayanan pendidikan khusus untuk masyarakat miskin.

Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dan Berbagai masalah yang melingkupinya, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Studi kasus SDN 01 Batealit)”. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN 01 Batealit tahun 2018 mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan.

1.2.Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitiannya hanya pada pengelolaan keuangan dana BOS yang ada pada SDN 01 Batealit. Dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan penulis menfokuskan pada transaksi-transaksi, bukti transaksi, bukti pendukung sampai dengan pelaporan yang sesuai dengan petunjuk teknis BOS.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada SDN 01 Batealit ?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada SDN 01 Batealit ?

1.4.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bagaimana proses pengelolaan dana BOS pada SDN 01 Batealit.
2. Mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN 01 Batealit.

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait diantaranya adalah :

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan peneliti untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SDN 01 Batealit.

b. Bagi pengelola dana BOS

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana seharusnya pengelolaan dana BOS yang benar dan memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan dana fasilitas sekolah yang benar.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS dan memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan dana BOS yang ada di daerah telah wajar atau tidak.

d. Bagi akademik

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi peneliti selanjutnya mengenai pentingnya akuntabilitas

pengelolaan dana BOS. Selain itu juga bisa menambah referensi baru bagi peneliti selanjutnya.

